

Identifikasi Masalah Dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Pedoman Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Yossi Christian Korah¹, Edwin Wantah², Cecilia Kewo³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis kebutuhan dalam pengembangan Pedoman materi pelatihan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sakti pada satuan kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Teknik penelitian deskriptif kualitatif dengan persentase. Subjek penelitian berjumlah 15 peserta orang, yaitu staf pengelola keuangan dari bawaslu Kabupaten Kota se propinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan staf pengelola keuangan bawaslu Kabupaten kota yang menjadi informan dalam identifikasi masalah dan analisis kebutuhan ini mengungkapkan bahwa 1) mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi Sakti dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu 2) Staf keuangan bawaslu tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam pemanfaatan aplikasi Sakti dalam pengelolaan keuangan di lingkungan bawaslu. Bertolak dari hasil identifikasi masalah tersebut kemudian di lakukan analisis kebutuhan pengembangan materi pelatihan pemanfaatan aplikasi Sakti dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten dan Kota di propinsi Sulawesi Utara. Adapun hasil analisis kebutuhan lewat penelitian awal adalah : 1) Staf bawaslu membutuhkan adanya panduan berupa materi pemanfaatan aplikasi Sakti dalam pengelolaan keuangan di lingkungan bawaslu 2) Staf Bawaslu membutuhkan adanya pelatihan teknis yang terkait dalam pemanfaatan aplikasi Sakti yang mempermudah mereka mengelolah keuangan di lingkungan Baawaslu.

Kata Kunci: Identifikasi masalah, analisis kebutuhan, Pengelolaan Keuangan, Aplikasi Sakti

Copyright (c) 2022 Yossi Christian Korah

✉ Corresponding author :

Email Address : yossi.korah000@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu reformasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sejak bergulirnya paket undang-undang keuangan negara pada tahun 2003 adalah reformasi sistem informasi. Salah satu dari rangkaian proses reformasi informasi tersebut, yaitu dengan diimplementasikannya SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sejak tahun 2014 dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) mulai tahun 2016. Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan paket pengelolaan keuangan Negara yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga. Dalam lingkup satuan kerja tersebut, implementasi IFMIS diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi pada satuan kerja (saat ini jumlahnya sangat banyak dengan data base yang terpisah-pisah) menjadi satu aplikasi dengan data base yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan pengulangan entry data. Penggabungan aplikasi dan database pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi di lingkup Satuan kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Aplikasi SAKTI yang akan dikembangkan meliputi penggabungan fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan anggaran, akan terdapat beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Untuk memfasilitasi pengiriman data dari aplikasi SAKTI yang ada di lingkup satuan kerja ke aplikasi SPAN yang ada pada Kementerian Keuangan, juga dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi Portal SPAN dan SPAN SMS. SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang akan digunakan oleh mereka yang memiliki fungsi perbendaharaan di satuan kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda tangan SPM, serta Bendahara dengan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing, sehingga akses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk mereka yang menjalankan fungsi Perbendaharaan yang berbeda-beda tersebut.

Aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan di SAKTI antara lain, aplikasi RKAKL DIPA menjadi modul anggaran, aplikasi SAS menjadi modul komitmen dan pembayaran, aplikasi SILABI menjadi modul bendahara, aplikasi SIMAK BMN menjadi modul aset tetap, aplikasi persediaan menjadi modul persediaan, dan aplikasi SAIBA menjadi modul piutang dan pelaporan. Saat ini perkembangan Sistem Informasi menjadi kebutuhan yang penting bagi semua organisasi, termasuk pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kinerja dalam memberikan informasi yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Setidaknya ada 9 aplikasi yang digunakan terdiri dari SAS, SIMAK-BMN, Persediaan, RKA K/L DIPA, SiLabi, SAIBA, e-Rekon, Pin PPSPM, dan Renkas. Banyaknya aplikasi yang digunakan membuat Satker merasa terbebani karena harus menguasai semua aplikasi tersebut, karena tidak semua Satker mempunyai Sumber Daya yang memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah proses pengelolaan keuangan negara, secara terus-menerus mengembangkan teknologi informasi

yang telah disediakan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan merupakan sebuah solusi terpadu pengelolaan keuangan negara di tingkat Satuan Kerja. Sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. SAKTI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di Satker menjadi satu aplikasi, sehingga pengguna atau user tidak perlu mengakses banyak aplikasi dalam mengelola keuangan negara. Sejak 2015, SAKTI sedang pada tahap piloting untuk memastikan bahwa SAKTI layak untuk digunakan oleh I-2 seluruh Satker di Indonesia. Dalam pengoperasiannya, SAKTI masih terdapat berbagai kendala. Sesuai dengan pernyataan Surya dan Supriyatna (2013:1) bahwa organisasi berbentuk apa pun jika menggunakan teknologi informasi pada akhirnya memang akan berhadapan dengan berbagai IT Risks atau gangguan yang semakin kompleks dan variatif di era sekarang ini. Menurut Astri selaku Pelaksana Sub Bagian administrasi keuanganTata Usaha bawaslu Sulawesi utara menyampaikan beberapa kendala dari SAKTI, yaitu: 1. Aplikasi SAKTI ini masih kurang user friendly dibandingkan aplikasi existing karena user masih belum memahami dengan baik cara mengoperasikan SAKTI. 2. Adanya update baik aplikasi maupun referensi mengingat perubahan peraturan yang dinamis sehingga menuntut user untuk beradaptasi kembali dalam pengoperasian SAKTI.

Enny wijayanti selaku staf di Perbendaharaan bawaslu Provinsi Sulawesi utara menyampaikan kendala dari SAKTI, diantaranya 1. SAKTI Di Satker Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dioperasikan secara online dan server berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga jika koneksi internet atau infrastruktur jaringan di pusat mengalami gangguan, maka user di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi utarapun tidak dapat mengakses SAKTI. 2. Sumber Daya Manusia di luar Kementerian Keuangan kemungkinan belum mempunyai pengetahuan mengenai akuntansi berbasis akrual sehingga akan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Jika ada kesalahan dalam input data, user tidak dapat langsung mengubah data yang salah karena harus menghubungi administrator terlebih dahulu. Jika tidak diperbaiki maka output menjadi tidak akurat. Berdasarkan kendala-kendala dari SAKTI tersebut maka diperlukannya suatu Pengembangan Materi Pelatihan terhadap aplikasi SAKTI yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dan mengetahui kesiapan dan kapabilitas dari SAKTI. Untuk menilai aplikasi ini, peneliti akan meneliti untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses dari SAKTI. Penelitian ini pada perlu Sistem Informasi yang diteliti, tempat penelitian, dan domain yang digunakan. Penelitian ini akan meneliti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Satker Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk Mengembangkan Materi Pelatihan dari aplikasi SAKTI. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pencapaian tujuan dari Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengembangkan aplikasi tersebut.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak perlu merumuskan hipotesis. Data yang telah terkumpul dalam bentuk angka kemudian dihitung dalam bentuk persentase yang dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipresentasikan dan disajikan berupa persentase lalu ditafsirkan ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Data kualitatif yang diangkakan sekedar hanya untuk mempermudah dalam penggabungan dua atau lebih variable, kemudian sesudah didapat hasil akhir lalu dikualifikasikan Kembali. Teknik ini sering disebut Teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Tahap awal penelitian ini dilaksanakan, dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan memanfaatkan aplikasi SAKTI. Identifikasi permasalahan dimulai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada aktivitas staf keuangan di Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara dan Juga Beberapa aktivitas staf Bawaslu Kabupaten/ Kota se propinsi Sulawesi Utara dengan jumlah sampel staf yang di random berjumlah 10 orang staf keuangan Bawaslu.

Dari hasil observasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Masalah yang teridentifikasi	Kebutuhan Staf Bawaslu
Tidak semua staf pengelola keuangan bawaslu menguasai aplikasi SAKTI	Semua staf pengelola keuangan Bawaslu Propinsi Sulut dan Kabupaten/Kota membutuhkan Literasi terkait pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu
Pihak Bawaslu Tidak memiliki panduan Teknis pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu	Staf Keuangan Dilingkungan Bawaslu Sulawesi Utara dan Kabupaten / Kota membutuhkan panduan pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu
Belum di laksanakan nya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara	Staf Keuangan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara Membutuhkan Pelatihan Teknis pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu staf pengelola keuangan wajib memahami dan mampu memanfaatkan aplikasi SAKTI dalam rangka memudahkan perencanaan keuangan serta pelaporan akuntansi keuangan serta pencatatan pengeluaran serta pemanfaatan anggaran di lingkungan Bawaslu Propinsi Sulawesi utara.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Untuk menguatkan hasil observasi tersebut dalam mengidentifikasi masalah dan menganalisis kebutuhan, maka selanjutnya dilakukan focus grup Discussion atau FGD terkait dengan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pemanfaatan aplikasi SAKTI serta analisis kebutuhan terkait

dengan pengembangan materi panduan penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Kesekretariatan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara.

Adapun hasil identifikasi melalui angket dipaparkan dalam tabel berikut ini :

No.	Komponen yang teridentifikasi	Jawaban		
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah Aplikasi SAKTI dapat membantu proses pengelolaan keuangan di Lingkungan Kesekretariatan Bawaslu	90%	10%	0
2.	Apakah Pengembangan Materi panduan pemanfaatan aplikasi SAKTI perlu di lakukan	80%	20%	0
3.	Apakah staf Pengelola keuangan Bawaslu membutuhkan pelatihan Pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan Keuangan	100%	0	0
4.	APakah Materi Panduan Pemanfaatan aplikasi SAKTI dapat membantu tugas tugas Staf Keuangan Bawaslu	100%	0	0
5.	Apakah staf keuangan Bawaslu membutuhkan pelatihan pemanfatan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu	90%	10%	0
6.	Apakah dengan adanya Materi Panduan Pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan bawaslu staf keuangan dapat beradaptasi dengan cepat dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Bawaslu	80%	20%	0

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap komponen yang teridentifikasi bahwa staf keuangan bawaslu Propinsi Sulawesi utara sangat membutuhkan akan materi panduan pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam mempermudah pengelolaan keuangan di lingkungan bawaslu.

3. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Untuk menguatkan hasil yang diperoleh melalui penyebaran angket, maka kemudian dilakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap staf pengelola keuangan bawaslu yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini, dimana jumlah responden sebanyak 2 orang staf keuangan bawaslu yang bukan sebagai responden atau sumber informasi dari Focus Group Discussion . Hasil wawancara mendalam dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Dari wawancara mendalam pada staf LT ddi dapatkan informasi bahwa mereka sangat membutuhkan akan pengembangan materi panduan

pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam membantu tugas tugas mereka dalam mengelola keuangan di lingkungan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara (LT:S: 01)

2. Hasil wawancara pada staf lainnya yaitu KL di dapatkan informasi bahwa mereka kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di lingkungan bawaslu dan merek membutuhkan sekali pelatihan pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan (KL:S: 01)

SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah Staf pengelolah keuangan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara serta Bawaslu Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara sangat membutuhkan materi panduan pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu. Staf Keuangan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara juga sangan membutuhkan pelatihan teknis terkait dengan pemanfaatan Aplikasi SAKTI dalam memudahkan mereka mengelola keuangan di lingkungan kesekretariatan Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara.

Referensi :

- Anggadini, S. D. (2018). Quality Of Financial Information Management System On Quality Of Financial Statements Of Local Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9, 113-117.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi Ke Enam. Jakarta: Pt.Rinekacipta,2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Jakarta: BPK RI.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. (2013). *Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary*. COSO.
- Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2020. *Nexus Repository Manager OSS SAKTI*.
<http://10.242.99.41:8081/nexus/#view-repositories>, diakses 1 Maret 2020.
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Jean Piaget, 2002. *Tingkat Perkembangan Kognitif*. Jakarta, Gramedia.
- Kartikahadi, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Notoatmodjo, S (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Diakses dari:
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/223~PMK.05~2015Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Diakses dari:
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/131~PMK.05~2016Per.pdf>
- Republik Indonesia. 2004b. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Sekretariat Negara: Jakarta.

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Keuangan: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kementerian Keuangan: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi. Kementerian Keuangan: Jakarta.
- Romney & Steinbart. (2015). Sistem Informasi Akuntansi (Terjemahan oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari (ed.); 13th ed.). Salemba Empat: Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya: Bandung.
- Iskandar A., Amriani T. N., dan Subekan A. (2016). Evaluasi atas implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dengan pendekatan DeLone & Mclean information system success model (studi kasus mitra kerja KPPN Gorontalo dan Marisa). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 111135.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press.